

Audit BPK soal Hambalang untuk Anak Tangga Utama?

RABU (31/10) siang, serombongan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin Ketua BPK Hadi Purnomo menyerahkan hasil audit investigasi yang telah dilakukan sejak Februari 2012 hingga 30 Oktober 2012. Ada beberapa hal yang menarik dari temuan BPK yang diserahkan kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso itu, antara lain mengenai beberapa hal substansial yang berkaitan dengan persiapan dan pengadaan megaprojek sekolah olahraga di bukit Hambalang, Sentul, Jawa Barat, atau yang dikenal juga dengan P3 SON (Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional).

Dalam audit investigasi tersebut ada beberapa temuan yang memunculkan dugaan telah terjadi penyimpangan pada proyek tersebut, misalnya soal yang berkaitan dengan SK hak pakai, izin lokasi *site plan* proyek, izin mendirikan bangunan oleh kepala badan perizinan terpadu, pendapat teknis, kontrak tahun jamak (*multiyear*) yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, dan adanya dugaan pembiaran oleh Menpora yang seharusnya memiliki wewenang pengendalian dan pengawasan. Selain itu, tidak melaksanakan pengendalian serta pengawasan sesuai dengan ketentuan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintahan serta adanya persetujuan Menteri Keuangan atas kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan persetujuan tahun jamak tersebut.

Di samping hal-hal tersebut masih ditengarai adanya soal penyimpangan pelelangan yang dilakukan Sekretaris Kemenpora dan menetapkan lelang konstruksi di atas Rp50 miliar tanpa adanya pendelegasian kewenangan dari Menpora yang diduga melang-

gar tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres 80 Tahun 2003 jo Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012). Dalam pengadaan barang dan jasa tersebut Menpora telah membiarkan adanya penyimpangan serta tidak melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan tersebut yang berpotensi adanya penyimpangan dan rekayasa dalam proses pelelangan serta pengerjaan konstruksi. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan kerja sama operasional (KSO), yang dilakukan dengan menyubkontrakan sebagian pekerjaan utamanya (konstruksi) kepada perusahaan lain, bertentangan dengan aturan tentang pengadaan barang jasa pemerintah.

Dengan melihat banyaknya dugaan penyimpangan tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa potensi kerugian negara atas proyek Hambalang tersebut menurut hasil investigasi BPK sebesar Rp243,9 miliar, yang terdiri dari kerugian karena selisih pembayaran uang muka sebesar Rp116,9 miliar, kerugian karena mekanikal elektronik Rp75,7 miliar, dan kerugian karena pekerjaan struktur sebesar Rp51 miliar. Indikasi kerugian negara tersebut diperoleh dengan cara membandingkan jumlah dana yang dikeluarkan Kemenpora dengan nilai pekerjaan sebenarnya (pekerjaan riil atau *real cost*) yang dikerjakan subkontraktor yang dihitung uji petik.

Dengan demikian, dengan laporan BPK tersebut dapat

Jamal Wiwoho
Pembantu Rektor II dan dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

dikatakan bahwa ada indikasi penyimpangan perundangan-undangan (UU Lingkungan Hidup, khususnya terkait

analisis mengenai dampak lingkungan/amdal, peraturan pemerintah/peraturan presiden yang berkaitan dengan

pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan tata ruang dan wi-



BULAN Oktober baru saja lewat. Pada sampul biografi pengusaha Yulius Tahiya (1916-2002) tertera kutipan pernyataannya, 'Di Indonesia ini, selama mayoritas bangsa kita masih hidup pas-pasan, maka kita yang menduduki posisi ekonomi menonjol patut hidup serba sederhana tanpa suka memamerkan kelebihan pribadi'. Edisi kedua biografi pejuang kemerdekaan berjudul *Melintasi Cakrawala* itu terbit Oktober tahun lalu.

Seruan moral tersebut meluncur tepat pada Oktober, bulan yang diwarnai catatan-catatan sejarah politik dan sosial penting bagi bangsa ini. Oktober diawali dengan Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1, yang memperingati ketetapan bahwa Pancasila menjadi dasar NKRI. Paragraf ke-4 Pembukaan UUD 1945 mencantumkan lima sumpah utama: Sila Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Namun kita akhir-akhir ini abai mengalmkannya.

Tanggal penting berikutnya ialah peringatan hari berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober. TKR bermula dari Badan Keaman-

an Rakyat (BKR) yang bukan tentara resmi. Tetapi TKR organisasi tentara resmi yang diperlukan oleh sebuah negara merdeka. Setelah digabungkan barisan-barisan bersenjata lain yang ada waktu itu, TKR menjadi TNI. Melalui Dekrit Presiden, tanggal 5 Oktober 1945 diperingati sebagai hari kelahiran TNI.

Di bidang politik praktis, Oktober juga mencatat terbenaknya Sekretariat Bersama Golongan Karya yang didirikan golongan militer pada 20 Oktober 1964 untuk menghadapi yang dianggap peningkatan rongrongan PKI. Sekber Golkar menghimpun puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan. Sesuai ketentuan dan ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada 17 Juli 1971 Sekber Golkar mengubah diri menjadi Golkar; kemudian menjadi Partai Golkar setelah reformasi.

Bulan Oktober memang menghembuskan elan perjuangan. Jauh sebelum

Melintasi Cakrawala Sejarah



Toeti Prahas Adhitama
Anggota Dewan Redaksi Media Group

Patut disebut kemenangan Jokowi yang dianggap kemenangan aspirasi rakyat kecil. Gejala ini sejalan dengan keinginan rakyat banyak untuk membuat perubahan atas kehidupan yang dirasakan kehilangan keteladanan.

perjuangan fisik berangsur memujud menjadi perjuangan kemerdekaan yang gagap gemita, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menengarai lahirnya bangsa Indonesia setelah proses perjuangan ideologi yang berlangsung lama melawan penindasan penjajah selama ratusan tahun.

Lintasan sejarah bagi orang muda

Sebagian dari lintasan sejarah yang terparap tadi mungkin menimbulkan nostalgia pada yang pernah mengalaminya atau ikut berjuang di dalamnya. Tontonan televisi yang informatif dan edukatif tentang masa-masa penderitaan maupun kejayaan masa lalu bisa membangkitkan rasa bangga. Ada yang bertanya, mengapa ada di antara generasi muda masa kini yang terkesan tidak peduli pada sejarah perjuangan masa lalu sekalipun menikmati hasil-hasil pembangunan generasi sebelumnya. Bagaimana kadar rasa kebangsaan mereka?

Dakwa-mendakwa biasa ter-

jadi antargenerasi. Pernah seorang dari angkatan '66 menjadi berang ketika disebut hidup di menara gading oleh angkatan sebelumnya. Dia menjawab, generasi muda memiliki masa depan lebih panjang daripada generasi sebelumnya. Itu sebabnya dia lebih berorientasi ke masa depan daripada selalu menengok ke belakang.

Barangkali memang tidak adil mengharapkan pemuda sekarang memiliki alam pikiran seperti alam pikiran pemuda di awal bangkitnya kesadaran nasional. Juga tidak adil bila memastikan bahwa rasa kebangsaannya kalah tebal. Angkatan '28, '45, '55, '66, dan angkatan sekarang memiliki gaya hidup berbeda-beda. Tetapi kalau soal rasa kebangsaan, belum tentu yang satu kalah dari lainnya. Bukan tidak mungkin anak-anak sekarang mencemaskan bagaimana membangun kehidupan dan penghidupan masa depan, dan bagaimana memberi respons terhadap tantangan zaman. Tiap generasi adalah produk dari zamannya.

Rakyat besar, rakyat kecil

Sejarah untuk dikenang, sejarah untuk pelajaran. Apa yang bisa dipelajari oleh generasi masa depan tentang kehidupan sekarang? Tahun-tahun terakhir menyaksikan terbukanya kotak pandora berkat kebijakan pemerintahan SBY. Terbongkarlah cela rohaniah sebagian rakyat besar. Berbeda dengan rakyat kecil, rakyat besar menikmati hidup karena dimanjakan oleh kekayaan, kekuasaan, dan prestise yang kait-mengait.

Menurut *Society Today* (Richard L. Roe, editor, 1971), kekuasaan bisa berarti kemampuan mempertahankan sesuatu sekalipun ada tantangan. Dengan demikian, kekuasaan juga berarti 'kemampuan'. Sumbernya ada empat: posisi institusional, harta kekayaan, kekuatan fisik, karisma.

Mereka yang memiliki kekuasaan umumnya banyak mengambil keputusan dalam kehidupan masyarakat. Mereka juga kita kenal sebagai kaum elite-dari kalangan pemerintahan, cerdik pandai, bisnis, pe-

itu dengan sangat cepat bisa jadi, siapa yang mengurusnya, dan siapa saja pejabat terlibat dengan sebelumnya hak atas tanah tersebut. Pada proses pembangunan, misalnya, siapa yang mengeluarkan IMB, berapa lama proses IMB itu bisa kelar, apakah sebelum megaprojek itu sudah dilakukan dan diawali dengan amdal dengan baik dan benar?

Selain itu, dalam pembangunan sekolah calon olahragawan yang andal tersebut, apakah sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang benar, misalnya dalam proses lelang apakah sudah sesuai dengan aturan lelang atau belum.

Hal yang sangat penting ialah bagaimana pertanggungjawaban terhadap dua Kementerian, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Keuangan. Tentunya tidak dapat dimungkiri bahwa Andi Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga serta Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam hati kecil sudah tahu bagaimana keduanya bisa diposisikan sebagai dua tokoh sentral yang tahu banyak tentang kondisi sebenarnya.

Hasil audit investigasi tersebut bukanlah barang yang mati dan amat bermanfaat bagi KPK sebagai data pendukung guna melengkapi alat bukti dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan perkara yang pantas diduga banyak melibatkan para birokrat, baik pusat maupun daerah, tokoh partai politik, pelaku usaha yang mempunyai reputasi nasional, serta pihak lain.

Publik sangat berharap akan sesuatu yang baru dalam gelar perkara yang dijanjikan KPK mengenai perkembangan kasus tersebut. Begitu banyaknya harapan dan cinta masyarakat Indonesia kepada KPK. Maka, maju dan bergesaslak KPK untuk menuntaskan masalah yang hampir sepanjang tahun ini menjadi sorotan publik tersebut. Semoga.

negak hukum, gerakan politik, bahkan kalangan agama yang memiliki karisma, yang mampu memengaruhi lain-lainnya.

Tentu hanya oknum-oknum bermoral rendah yang mengalami cela rohaniah. Selama mereka memegang kekuasaan, mereka cenderung bersikap arogan; suatu gejala yang mengganggu dan menekan perasaan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan, khususnya rakyat kecil.

William Fulbright, penulis *The Arrogance of Power*, menyatakan, "Bila mau berbenah diri, bahaya-bahaya arogansi kekuasaan pasti bisa disingkirkan. Tentunya itu berarti bersedia mengorbakan sebagian perasaan yang menganggap diri hebat. Namun pengorbanaan itu akan memadai demi akibat-akibat positif yang bisa dihasilkan."

Dalam kaitan itu, patut disebut kemenangan Jokowi yang dianggap kemenangan aspirasi rakyat kecil. Gejala ini sejalan dengan keinginan rakyat banyak untuk membuat perubahan atas kehidupan yang dirasakan kehilangan keteladanan. Gerakan perubahan menjadi tuntutan demi terciptanya kehidupan yang lebih baik.

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon dan foto kopi KTP)



Pendir: Drs. H. Teuku Youlsi Syah MSI (Alm)
Direktur Utama: Lestari Moerdijat
Direktur Pemberitaan: Usman Kansong
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Djafar H. Assegaff, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong
Redaktur Senior: Elman Saragih, Laurens Tato
Kepala Divisi Pemberitaan: Kleden Suban
Kepala Divisi Content Enrichment: Gaudensius Suhardi
Deputi Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar
Sekretaris Redaksi: Teguh Nirwahyudi
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Fitriana Siregar, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing
Asisten Kepala Divisi Foto: Hariyanto

Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Purno, Anton Kustedja, Cri Onon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatrika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Sadyo Kristianto, Santhy M. Sibarani, Soelito-jono, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dwi Indriantari
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andreas Timothy, Aries Wijak-sena, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Bunga Partito, Cornelius Eko, Daniel Wesley Rudolf, Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Diny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edna Agitta Merynanda, Emir Chairullah, Eri Kartinah, Fardiansah Noor, Fidel Ali Permana, Gayatri Suroyo, Gino F. Hadi, Hafidz Mukti Ahmad, Heru Prihantoro, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Marchelo, Mirza Andreas, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nesty Trioka Pamungkas, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujiyanto, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswanti Suryandari, Sitriah Hamid, Siska Nurifah, Sugeng Sumaryadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarif Oebaidillah, Thalatie Yani, Tutus Subronto, Usman Iskandar, Vini Marjane Rosya, Zubaedah Harum

Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Yusuf Riaman (NTB); Bahaman (Palembang); Parulian Manulang (Pa-

dang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)

MICOM

Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo, Victor J.P. Nababan
Redaktur: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka Purnama, Heni Salomo Siagian, Patna Budi Utami, Yulius Martinus.
Staf Redaksi: Edwin Tirani, Fario Untung, Heni Rahayu, Irvan Sihombing, Nurtjahyadi, Prita Daneswari, Retno Hemawati, Rina Garmina, Rita Ayuningtyas, Wisnu Arto Subari
Staf: Abadi Suroono, Abdul Salam, Budi Haryanto, Charles Silaban, M. Syaifulah, Panji Arimurti, Rani Nuraini, Ricky Julian, Vicky Gustiawan, Widjokongko

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)

Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman
Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Regina Panontongan

CONTENT ENRICHMENT

Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yastini S. Devi Asriana, Gurit Adi Suryo
Bahasa: Dony Tjptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto

ARTISTIK

Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Aria Mada, Ariefi Anggadha, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Bryan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahrir, Haris Imron Armani, Haryadi, Marion-sandez G. M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkiana Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi
Oliah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarnan

PENGEMBANGAN BISNIS

Senior Kepala Divisi Sales & Marketing: Amdoni Nuzhaki Zakir
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Kepala Divisi Marketing Support & Publishing: Andreas Sujijono
Asisten Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Perwakilan Bandung: Ahmad Harun (022) 4210500; **Medan:** Joseph (061) 4514945; **Surabaya:** Tri Febrianto (031) 5667359; **Semarang:** Desijhon (024) 7461524; **Yogyakarta:** Andi Yudhanto (0274) 523167; **Palembang:** Ferry Mussanto (0711) 317526; **Pekabaru:** Bambang Irianto 081351738384.

Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, **Telepon/ Fax Iklan:** (021) 5812107, 5812113, **Telepon Sirkulasi:** (021) 5812095, **Telepon Distribusi:** (021) 5812077, **Telepon Percetakan:** (021) 5812086, **Harga Langganan:** Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, **No. Rekening Bank:** a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, **Diterbitkan oleh:** PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, **Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:** Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, **Telepon:** (021) 5812088 (Hunting), **Fax:** (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, **Percetakan:** Media Indonesia, Jakarta, **ISSN:** 0215-4935, **Website:** www.mediaindonesia.com.

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENEMERKA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN